

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

DISUSUN OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2023

# I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	5	6	7
1	Penanggung Jawab Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan	Sekretartis	Samarinda 2023	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
2	Penanggungjawab Program / Kegiatan	Sekretaris	Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
2		Sekretaris			Seidilid Belidku
3	Anggaran Program dan Kegiatan	Sekretartis	Samarinda 2023	Hard Copy Soft Copy	Selama Berlaku
			Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	Hard Copy Soft Copy	
4	Anggaran Program dan Kegiatan	Sekretaris			Selama Berlaku

			Bapenda Provinsi	Hard Copy Soft	
			Kalimantan	Сору	
			Timur		
5	LAKIP	Sekretaris			Selama Berlaku
			Bapenda Provinsi	Hard Copy Soft	
			Kalimantan	Сору	
			Timur		
6	RENSTRA	Sekretaris			Selama Berlaku
	Laporan Kinerja Badan		Samarinda	Hard Copy	
7	Pendapatan Daerah Provinsi	Sekretartis	2023	Soft Copy	Selama Berlaku
	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur				
	Nomor 6		Samarinda 2022	Hard Copy Soft	
8	Tahun 2021 Tentang Retribusi	Sekretartis		Сору	Selama Berlaku
	Rencana Kerja Badan		Samarinda	Hard Copy	
9	Pendapatan Daerah Provinsi	Sekretartis	2023	Soft Copy	Selama Berlaku

### II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	5	6	7
	Data Informasi Wajib Pajak ( Pajak Bahan		Bapenda Provinsi		
	Bakar Kendaraan Bermotor dan pajak Air		Kalimantan		
	Permukaan )		Timur		
1		Kabid Pajak		Soft Copy	Selama Berlaku
	Data Informasi Wajib Pajak ( Pajak		Bapenda Provinsi		
	Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama		Kalimantan		
	Kendaraan		Timur		
2	Bermotor )	Kabid Pajak		Soft Copy	Selama Berlaku

			Bapenda Provinsi		
			Kalimantan		
	Informasi Rinci tentang Wajib Pajak		Timur		
3		Kabid PSIPP		Soft Copy	Selama Berlaku

# III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

		PEJABAT YANG MENGUASAI/	WAKTU DAN TEMPAT	FORMAT	JANGKA WAKTU
NO	NAMA INFORMACI	PENANGGUNG JAWAB	PEMBUATAN	INFORMASI	PENYIMPANAN
NO	NAMA INFORMASI		INFORMASI	YANG TERSEDIA	
1	2	3	5	6	7
			Bapenda Provinsi	Hard Copy Soft	
			Kalimantan	Сору	
	Profil Bapenda Provinsi Kalimantan Timur		Timur		
1		Sekretaris			Selama Berlaku
	Profil Badan Pendapatan Daerah		Samarinda	Hard Copy	
2	Provinsi Kalimantan Timur	Sekretartis	2023	Soft Copy	Selama Berlaku
			Bapenda Provinsi	Hard Copy Soft	
			Kalimantan	Сору	
	Visi dan Misi Bapenda Prov. Kaltim		Timur		
3		Sekretaris			Selama Berlaku
			Bapenda Provinsi	Hard Copy Soft	
			Kalimantan	Сору	
	Maksud dan Tujuan Bapenda Prov. Kaltim		Timur		
4		Sekretaris			Selama Berlaku
			Bapenda Provinsi	Hard Copy Soft	
			Kalimantan	Сору	
	Fungsi dan Tugas Bapenda Prov. Kaltim		Timur		
5		Sekretaris		<u>                                      </u>	Selama Berlaku
	Tugas dan Fungsi Badan		Samarinda	Hard Copy	

6	Pendapatan Daerah Provinsi	Sekretartis	2023	Soft Copy	Selama Berlaku
	Struktur Organisasi Badan		Samarinda	Hard Copy	
7	Pendapatan Daerah Provinsi	Sekretartis	2023	Soft Copy	Selama Berlaku
			Bapenda Provinsi	Hard Copy Soft	
			Kalimantan	Сору	
	Struktur Organisasi Bapenda Kalimantan		Timur		
8	Timur	Sekretaris			Selama Berlaku
	Profil Pejabat Struktural Badan Pendapatan				
	Daerah Provinsi		Samarinda 2023	Hard Copy Soft	
9	Kalimantan Timur	Sekretartis		Сору	Selama Berlaku
			Bapenda Provinsi	Hard Copy Soft	
	Profil Singkat Pejabat Struktural Bapenda		Kalimantan	Сору	
	Provinsi Kalimantan Timur.		Timur		
10		Sekretaris			Selama Berlaku
	Program dan Kegiatan Badan				
	Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan		Samarinda 2023	Hard Copy Soft	
11	Timur	Sekretartis		Сору	Selama Berlaku
			Bapenda Provinsi	Hard Copy Soft	
			Kalimantan	Сору	
	Program dan Kegiatan Bapenda Provinsi		Timur		
12	Kalimantan Timur	Sekretaris			Selama Berlaku
	Data Realisasi Pendapatan Prov		Samarinda	Hard Copy	
13	Kaltim Tahun Sebelumnya	Kabid PPSIP	2023	Soft Copy	Selama Berlaku
			Bapenda Provinsi		
	Data Realisasi Pendapatan Provinsi		Kalimantan		
	Kalimantan Timur Tahun Sebelumnya		Timur		
14		Kabid PPSIP		Soft Copy	Selama Berlaku
	Data Target Pendapatan Prov		Samarinda	Hard Copy	
15	Kaltim TA sebelumnya dan TA	Kabid PPSIP	2023	Soft Copy	Selama Berlaku
			Bapenda Provinsi		
	Data Target Pendapatan provinsi Kalimantan		Kalimantan		
	Timur TA				

16	Sebelumnya dan TA Berjalan	Kabid PPSIP	Timur	Soft Copy	Selama Berlaku
	Informasi Kendaraan Bermotor		Samarinda	Hard Copy	
17	yang Terintegrasi	Kabid PPSIP	2023	Soft Copy	Selama Berlaku
			Bapenda Provinsi		
			Kalimantan		
	Informasi Kendaraan Bermotor yang		Timur		
18	Terintegrasi	Kabid PPSIP		Soft Copy	Selama Berlaku

### IV. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

	INICORNACI	DASAR HUKUM PENGECUAMAN	KONSEKUENSI/PERTIMBA	ANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTO
1	2	3	4	5	6
1.	Surat usul/laporan/pengaduan dariUPTD PPRD BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tentang dugaan pelanggaran disiplin	UUNo.14Tahun2008tentangKIP Pasal17 huruf h		Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Berita Acara Pemeriksaan/Berita Acara Permintaan Keterangan dugaan pelanggaran displin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf h		Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/2010 tentangPeraturan Disiplin PNS	Tidak terbatas
3.	SK Hukuman Displin	UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	ldentitasPNS hukuman dispilin	UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h		hak pribadi PNS yang bersifat rahasia Tidak terbatas	Tidak terbatas
5.	Surat usul cerai/SK cerai/ Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UUNo.14Tahun2008 tentangKIP Pasal 17 huruf h		Melindungi hak pribadi PNS yang bersifatrahasia	Setelah terbit surat ijin perceraian
6.	Data hasil check up perorang CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf h		Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7.	Data hasil tes potensi perorang PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf h		Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai	UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf h		Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9.	Biodata elektronik PNS (database)yang terkait dengan data pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf h		Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
10.	Berkas/arsip dokumen PNS staf BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf h		Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

11.	Daftar rencana penempatan CPNS/PNS	UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mencegah kolusi	Sampai dengan penyerahan SK
12.	Data rencana usulan penempatan PNS dalam jabatan structural	UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf h	Menjaga iklim kondusif diling kungan kerja	Sampai dengan pelantikan
13.	Dokumen penawaran tender (rincianharga satuan)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b. UU No. 30Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2	Terciptanya persaingan usaha yang sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
14.	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
15.	Plafond anggaran kegiatan pengadaan	UU No. 14Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h	Membuat harga wajar sesuai dengan harga pasar	Sampai selesainya pengadaan barang/jasa
16.	Rician HPS pada saat pengadaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h	Membuat harga wajar dengan hargapasar	Sampai pemenang di tetapkan
17.	Laporan keuangan yang disusun sesua dengan standar akutansi yang berlaku	UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56	Karena belum hasil audit Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi KalimantanTimur yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur	Setelah audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur selesai
19.	Neraca	UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56	Karena belum hasil audit Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALKBAPENDA Provinsi Kalimantan Timur	SetELAH audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur selesai

20.	Catatan atas laporan keuangan (CALK) yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku	UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56	Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur	Setelah audit BPK selesai dan laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur selesai
21.	Daftar aset dan inventaris BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur	UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56	Laporan Keuangan BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam CALK BAPENDA Provinsi Kalimantan Timur	Setelah audit BPKAD selesai dan Iaporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur selesai
22.	Publik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat 1,2 dan 3	Menjaga/melindungi hak akses	tidak terbatas
23.	server colocation/data server fisik/topologi jaringan layanan samsat	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat 1,2 dan 3	Menjaga/melindungi hak akses	tidak terbatas
24.	Identitas wajib pajak ( sepanjang tidak dalam rangka proses penegakan hukum dan perintah pengadilan )	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 26ayat 1(penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan) atauran iniditurunkan dalam PP No.82 Tahun 2012 dan PP No.71 Tahun 2019	Menjamin <b>kerahasiaan data wajib pajak</b>	tidak terbatas